

LAPORAN KINERJA

Kanwil DJKN

Aceh



2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kanwil DJKN Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, serta lelang selama periode pelaporan.

Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja ini merupakan wujud komitmen Kanwil DJKN Aceh dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui laporan ini, disajikan gambaran capaian kinerja, analisis atas keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kanwil DJKN Aceh. Sebagaimana penetapan IKU Kemenkeu *Two* pada Kanwil DJKN Aceh Tahun 2025, maka rata-rata capaian IKU Kanwil DJKN Aceh Tahun 2025 (Nilai Kinerja Organisasi) adalah sebesar 115,61% yang berasal dari rincian 8 Sasaran Strategis (SS) dengan 18 IKU.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Kanwil DJKN Aceh serta para pemangku kepentingan atas dedikasi, kerja keras, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan informasi yang berguna bagi peningkatan kinerja Kanwil DJKN Aceh di masa yang akan datang.

manfaat dan menjadi bahan informasi yang berguna bagi peningkatan kinerja Kanwil DJKN Aceh di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 01 Februari 2026

Plt. Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh,



Ditandatangani Secara Elektronik

Nofiansyah



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Aceh selama periode Tahun 2025, serta sebagai sarana evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara umum, kinerja Kanwil DJKN Aceh pada periode pelaporan menunjukkan kategori sangat baik. Dari 18 indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan, semua indikator kinerja utama (IKU) telah tercapai atau melampaui target. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan rencana strategis organisasi.

Keberhasilan kinerja tersebut didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain peningkatan koordinasi internal dan eksternal, optimalisasi sumber daya, inovasi layanan, dan dukungan kebijakan. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, SDM, regulasi, atau faktor eksternal lainnya, yang mempengaruhi pencapaian target secara optimal.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil DJKN Aceh telah merumuskan langkah-langkah perbaikan yang mencakup misalnya: penguatan perencanaan, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, perbaikan tata kelola. Diharapkan upaya tersebut dapat meningkatkan kinerja organisasi pada periode selanjutnya serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pencapaian tujuan strategis.

Ringkasan eksekutif ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat, jelas, dan komprehensif mengenai capaian kinerja Kanwil DJKN Aceh, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ke depan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja secara terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil. Kewajiban tersebut sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan pentingnya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja secara berkesinambungan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh sebagai instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, serta pelaksanaan lelang. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus didukung oleh kinerja organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel guna memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan pembangunan nasional, khususnya di wilayah Provinsi Aceh.

Laporan Kinerja Kanwil DJKN Aceh Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga memuat analisis atas keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi internal bagi Kanwil DJKN Aceh dalam menilai tingkat efektivitas pencapaian sasaran strategis, sekaligus sebagai media transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, Laporan Kinerja Kanwil DJKN Aceh Tahun 2025 diharapkan mampu memberikan

gambaran yang komprehensif mengenai kinerja organisasi serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan pada tahun-tahun berikutnya.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kanwil DJKN Aceh

Kantor Wilayah DJKN Aceh merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Adapun tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kanwil DJKN menyelenggarakan fungsi:

1. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
3. pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
4. pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
5. pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
6. pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
7. pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
8. pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;

9. penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa;
10. pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
11. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Kanwil DJKN Aceh senantiasa berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu: “ Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang Profesional Dan Akuntabel Dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, Serta Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan Kanwil DJKN Aceh ”

Struktur organisasi Kanwil DJKN Aceh terdiri atas:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan, Kanwil DJKN Aceh memiliki 2 (dua) kantor operasional yang aktif, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe. Selain memiliki kantor operasional, struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh terdiri dari:

1. Bagian Umum;
2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;
3. Bidang Penilaian;
4. Bidang Piutang Negara;
5. Bidang Lelang;
6. Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1



Wilayah kerja Kanwil DJKN Aceh meliputi seluruh wilayah Propinsi Aceh yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota yang terbagi dalam wilayah kerja KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe. Adapun peta wilayah kerja Kanwil DJKN Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2



Wilayah kerja KPKNL Banda Aceh, meliputi:

1. Kota Banda Aceh
2. Kota Sabang
3. Kab. Pidie
4. Kab. Pidie Jaya
5. Kab. Aceh Besar
6. Kab. Aceh Barat
7. Kab. Aceh Selatan
8. Kab. Aceh Singkil
9. Kab. Aceh Jaya
10. Kab. Aceh Barat Daya
11. Kab. Simeulue
12. Kota Subulussalam
13. Kabupaten Nagan

Wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe, meliputi:

1. Kota Lhokseumawe
2. Kab. Aceh Utara
3. Kab. Aceh Tengah
4. Kab. Aceh Timur
5. Kab. Aceh Tamiang
6. Kab. Aceh Tenggara
7. Kab. Bireuen
8. Kota Langsa
9. Kab. Bener Meriah
10. Kab. Gayo Lues

Kanwil DJKN Aceh didukung oleh 37 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum, dan lainnya. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan, golongan, pendidikan, dan gender adalah sebagai berikut:

Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Pelaksana	-	11	4	-	15
2	Fungsional	-	1	3	-	4
3	Eselon IV	-	-	13	2	15
4	Eselon III	-	-	-	3	3
5	Eselon II	-	-	-	-	-
Jumlah		-	12	20	5	37

Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SLTP	-	-	-	-	-
2	MAN/SMA/SLTA/KPAA	-	-	1	-	1
3	D1	-	1	-	-	1
4	D3	-	6	-	-	6
5	D4/S1	-	5	8	-	13
6	S2	-	-	11	5	16
7	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		-	12	20	5	37

Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Gender

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	-	4	10	3	17
2	Perempuan	-	8	10	2	20
Jumlah			12	20	5	37

Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Kelompok Umur dan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	18-30 tahun	-	9	1	-	10
2	31-40 tahun	-	3	11	-	14
3	41-50 tahun	-	-	4	4	8
4	Di atas 50 tahun	-	-	4	1	5
Jumlah			12	20	5	37

Komposisi Tenaga Fungsional pada Kanwil DJKN Aceh

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Juru Sita	2
2	Pemeriksa	1
3	Pejabat Fungsional Pelelang	-
4	Pejabat Fungsional Penilai	3
5	Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN	1
Jumlah		7

C. Mandat dan Peran Strategis

1. Percepatan sertifikasi BMN berupa tanah Tahun 2025 di Lingkup Kantor Wilayah DJKN Aceh telah memenuhi target dengan realisasi sampai Q4 total sebanyak 1.683 bidang dari 1.252 target bidang tanah yang ditetapkan di awal tahun, dengan persentase capaian sebesar 134,50%. Capaian target di Tahun 2025 ini merupakan hasil capaian yang sangat signifikan.
2. Pemetaan Aset Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional ((BGN) direncanakan akan dioperasikan melalui 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang 1.542 di antaranya akan dibangun oleh BGN dengan rincian 3 SPPG di tiap kabupaten/kota. Sesuai dengan hasil **rapat koordinasi** pada tanggal 23 Oktober 2025 berdasarkan undangan Wakil Kepala BGN nomor B-25/02.01/07/2025 tanggal 22 Oktober 2025, pemenuhan kebutuhan lahan untuk pembangunan SPPG oleh BGN sebagian besar akan dipenuhi dari Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan lahan untuk pemenuhan SPPG mengingat perlunya dilakukan identifikasi atas kesesuaian kebutuhan lahan terhadap spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil tarikan SIMAN, terdapat 419 aset potensial, saat ini sedang dilakukan identifikasi dan pemetaan aset guna memenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan SPPG di wilayah Aceh.
3. Program Unggulan Pengurusan Piutang Negara yaitu Sosialisasi PMK 52 Tahun 2024 tentang Pengurusan Piutang Macet pada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
4. Program Unggulan Bidang Penilaian Tahun 2025 yaitu Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Pengguna, dimana terdapat 5 Pemerintah Kabupaten/Pemko yang telah memiliki Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah yaitu : Pemkab Simeuleue, Pemkab Aceh Barat, Pemkab Aceh Tenggara, Pemkab Nagan Raya dan Pemkab Banda Aceh, dengan jumlah PFPP sebanyak 9 (Sembilan) orang.

5. Pengadaan 14 rumah negara yang terdiri dari 6 (enam) rumah golongan c dan 8 (delapan) rumah untuk golongan d.
6. Realisasi Penerimaan Negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP BMN, Piutang Negara, dan Lelang) di lingkungan Kanwil DJKN Aceh Tahun 2025, dari Target sebesar Rp31.989.000.000,00 berhasil memperoleh realisasi sebesar Rp36.374.952.647,00.
7. Program Unggulan Bidang Lelang yaitu Lelang On The Road dan Duek Pakat Lelang 2025. Lelang *on the Road* merupakan upaya untuk mensosialisasikan Portal Lelang Indonesia versi 2 kepada pengguna layanan lelang yang dilaksanakan satu kali setiap triwulan dan Duek Pakat merupakan istilah dalam bahasa Aceh yang berarti musyawarah atau forum diskusi bersama. Dalam konteks kegiatan Duek Pakat Lelang 2025, istilah tersebut diadopsi sebagai nama forum diskusi strategis di bidang lelang Kanwil DJKN Aceh yang melibatkan para Pejabat Lelang serta instansi lainnya di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Aceh.

D. Sistematika Laporan

1. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang gambaran umum kinerja Kanwil DJKN Aceh Tahun 2025, Capaian Kinerja strategis utama dan tantangan serta upaya perbaikan.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi meliputi, latar belakang, tugas, fungsi, struktur organisasi, Mandat dan Peran Strategis, Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025 dan sistematika laporan

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan Perencanaan Strategis, Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan tahun 2024;
- 3) Menganalisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 4) Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 5) Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- 6) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi yang telah diupload ke aplikasi e-sakip); dan/atau
- 7) Rencana aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu alat untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja, tidak hanya dari sisi penyerapan dana, tetapi juga kualitas perencanaan dan pelaksanaannya.

5. BAB IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2026
- 2) Tabel Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2025
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana kinerja Kanwil DJKN Aceh Tahun 2025 mengacu pada Renstra DJKN Tahun 2025-2029, Renja Kementerian Keuangan Tahun 2025, serta RKA Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan tema APBN yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan digunakan untuk mengantisipasi kondisi masa depan sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Kantor Wilayah DJKN Aceh memiliki visi yang sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2025-2029 yaitu, menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan di Provinsi Aceh.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Kanwil DJKN Aceh menetapkan misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Penjabaran atas misi tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk tujuan yang memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan Kanwil DJKN Aceh sebagaimana tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan;
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya;
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Dalam kurun waktu 2025-2029, Kanwil DJKN Aceh mempunyai arah kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara secara profesional dan akuntabel demi terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Arah kebijakan dan strategi Kanwil DJKN Aceh tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat finansial dan social

Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai dalam Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat finansial dan social yaitu :

- 1.1. Pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan nasional.

Adapun strategi untuk mewujudkannya yaitu :

1. Penyelesaian sertipikasi BMN berupa tanah;
2. Penguatan pengawasan dan pengendalian BMN.
3. Penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta BMN dalam mendukung program Kebijakan Satu Peta.
4. Sinkronisasi RKBMN dengan sistem perencanaan penganggaran belanja terkait BMN.
5. Optimalisasi pengelolaan BMN eks BMN Idle oleh Pengelola Barang.
6. Penyempurnaan regulasi dan pengelolaan BMN berupa Rumah Negara antara lain melalui pengembangan Submodul Rumah Negara pada SIMAN.

7. Penguatan implementasi pengasuransian BMN melalui peningkatan jumlah dan perluasan jenis BMN yang diasuransikan dan pengembangan skema pembayaran premi asuransi BMN.
8. Penyusunan kebijakan persiapan pelaksanaan pengelolaan BMN di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
9. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali Barang Milik Negara.
10. Penyusunan rekomendasi kebijakan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah (BMD).

1.2. Pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang akuntabel

Adapun strategi untuk mewujudkannya yaitu :

1. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian aset Kekayaan Negara Lain-lain dalam rangka pengamanan aset secara administrasi dan fisik.
2. Pengembangan basis data Kekayaan Negara Lain-lain yang andal dan terintegrasi.
3. Pengamanan aset KNL secara hukum melalui pensertipikatan aset Kekayaan Negara Lain-lain berupa tanah.
4. Penyusunan kebijakan dalam rangka pengelolaan dan/atau penyelesaian Kekayaan Negara Lain-lain.
5. Penyusunan kajian peningkatan peran Kementerian Keuangan dalam pengelolaan Kekayaan Negara yang dikuasai yang lebih terintegrasi.

1.3. Pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel dan efektif untuk mendorong perekonomian dan pembangunan nasional

Adapun strategi untuk mewujudkannya yaitu :

1. Peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan pembinaan.
2. Penguatan Tata Kelola dan Dukungan Pemerintah pada Lembaga Pengelola Investasi sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF).

1.4. Pengelolaan piutang negara yang akuntabel dan efektif dalam menjamin hak tagih negara.

Adapun strategi untuk mewujudkannya adalah :

1. Penyempurnaan regulasi dalam rangka mendukung proses bisnis pengurusan Piutang Negara yang telah diserahkan kepada PUPN dan pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga.
 2. Pengembangan sistem informasi di bidang Piutang Negara dengan penambahan fitur yang mendukung penatausahaan pengurusan Piutang Negara yang diserahkan kepada PUPN dan pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga.
 3. Perumusan kebijakan terkait pembelian barang jaminan/harta kekayaan lain oleh Penyerah Piutang melalui lelang dalam rangka pengurusan Piutang Negara.
 4. Penguatan sinergi dalam implementasi regulasi terkait pengurusan piutang Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan

Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai dalam Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan adalah Peningkatan layanan penilaian BMN, penilaian SDA, dan advisori

Adapun strategi untuk mewujudkannya yaitu:

1. Penyusunan daftar tarif pokok sewa BMN dalam rangka percepatan layanan pemanfaatan BMN
 2. Penguatan peran Kementerian Keuangan dalam mendukung pengelolaan SDA secara berkelanjutan melalui kegiatan valuasi ekonomi jasa ekosistem.
 3. Perumusan regulasi dan proses bisnis pelayanan advisori di bidang penilaian
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya

Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai dalam Layanan lelang yang modern dan terpercaya adalah Layanan lelang yang efisien, inklusif, dan kredibel

Adapun strategi untuk mewujudkannya yaitu:

1. Pengembangan Aplikasi Lelang dan interkoneksi dengan aplikasi mitra dalam rangka meningkatkan kemudahan layanan dan efisiensi waktu proses bisnis lelang
 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan lelang
 3. Optimalisasi penerapan lelang hak menikmati sebagai salah satu alternatif pemanfaatan aset
 4. Penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan dan pelaksanaan lelang oleh swasta
 5. Penguatan forum koordinasi dengan pihak/lembaga yang terlibat dalam lelang dan/atau memiliki kewenangan dalam penegakan hukum
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai dalam Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif yaitu :

4.1. Organisasi dan SDM yang optimal

Adapun strategi untuk mewujudkannya adalah :

1. Penataan unit yang menangani jenis aset dengan kompleksitas tinggi dan sifat penugasan khusus
2. Pengkategorian kantor pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik unit
3. Pengembangan karir SDM yang selaras dengan kompetensi individu (Job Matching) dan kebutuhan capaian program pengelolaan kekayaan negara
4. Perbaikan dan pemenuhan Standar Kompetensi SDM dengan mengoptimalkan Assesmen dan Implementasi Manajemen Pengetahuan melalui dokumentasi tacit and explicit knowledge dan penguatan *Community of Practice (CoP)*.

5. Harmonisasi dan optimalisasi pemenuhan kebutuhan SDM baik Struktural maupun Jabatan Fungsional dalam program pengelolaan kekayaan negara.
6. Pembentukan *Human Capital FrameWork DJKN*
7. Penyempurnaan proses bisnis DJKN secara berkelanjutan melalui simplifikasi, integrasi end-to-end, standardisasi layanan, dan pembaruan SOP/ABK berbasis data, dengan dukungan SPBE/TIK
8. Penajaman fungsi pembinaan dan advisori manajemen aset oleh Kantor Wilayah yang terstandar

4.2. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi

Adapun strategi untuk mewujudkannya adalah :

1. Pemutakhiran infrastruktur dan Tata Kelola TIK melalui penyusunan Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi DJKN
2. Simplifikasi, reengineering, dan integrasi sistem aplikasi, antara lain interkoneksi SIMAN, SIP, dan Aplikasi Lelang
3. Peningkatan integritas data dan implementasi data analitik sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang
4. Penguatan infrastruktur keamanan informasi, penguatan pengelolaan dan pengendalian keamanan informasi, penerapan data *security*, dan penguatan keamanan interoperabilitas antar aplikasi.

4.3. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

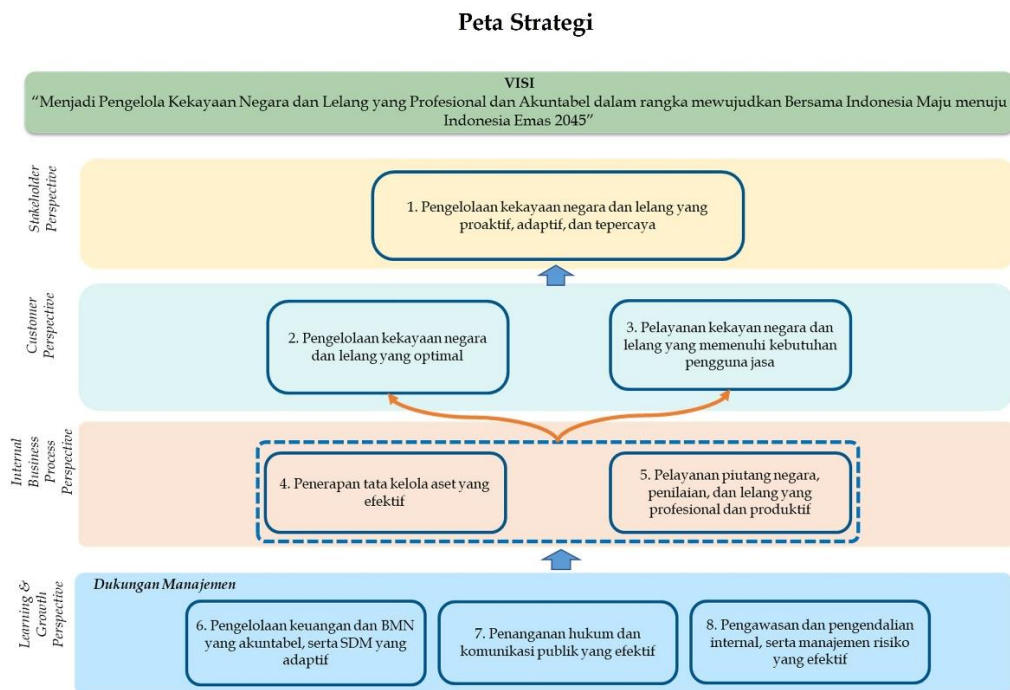
Adapun strategi untuk mewujudkannya adalah :

1. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi melalui penyusunan dan evaluasi secara berkala Risk Control Matrix seluruh Sasaran Strategis dan proses bisnis terkait

2. Peningkatan peran Lini Pertama dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pegawai melalui pengawasan melekat.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Gambar 2.1
Peta Strategi Kanwil DJKN Aceh Tahun 2025



Berdasarkan *Strategy Map* Kemenkeu-*Two* Kanwil DJKN Aceh Tahun 2025, menerapkan 4 perspektif, 8 Sasaran Strategis (SS) dengan 18 IKU dengan. Berikut ini merupakan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJKN Aceh beserta target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. Dalam perspektif ini terdapat 1 sasaran strategis, yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya akuntabel dalam mendukung akselerasi

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaktif, dan terpercaya.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dapat dikatakan optimal apabila kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Lain-lain, Kekayaan Negara Dipisahkan, Piutang Negara, dan Lelang terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya, sehingga mampu meningkatkan kontribusi penerimaan negara.

Realisasi Penerimaan Negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang khususnya PNBP Aset di lingkungan Kanwil DJKN Aceh Tahun 2025, dari Target sebesar Rp27.489.000.000,00 berhasil memperoleh realisasi sebesar Rp31.868.304.021. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 115,93%.

Nilai penerimaan negara dari PNBP Aset berasal dari:

- a. penerimaan dari hasil **pemanfaatan** Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL serta telah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
- b. penerimaan dari hasil **pemindahtanganan** Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan
- c. penerimaan dari hasil penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan oleh Pengadilan.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.1

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indeks integritas	Indeks	100
Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Persentase	100%

CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *customer*. Dalam perspektif ini terdapat 2

CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *customer*. Dalam perspektif ini terdapat 2 sasaran strategis, yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal dan Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.

Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara merupakan IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) pada tahun sebelumnya. SBSK merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Bentuk Optimalisasi Pengelolaan BMN sesuai PP 27 Tahun 2014 jo. PP 28 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan BMN
2. Pemanfaatan BMN
3. Optimalisasi lainnya seseuai PP 27 Tahun 2014 jo. PP 28 tahun 2020, antara lain: penyerahan ke pengelola sebagai BMN Idle, Rehabilitasi untuk BMN Rusak Berat (RB), dan Penghapusan.

Dalam proses pengukuran NUP untuk mengukur tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara di lingkup Kanwil DJKN Aceh terdiri dari tanah bangunan kantor, bangunan gedung kantor, tanah rumah negara, dan tanah mess/asrama. Pada Tahun 2025 target Kanwil DJKN Aceh sebanyak 383 NUP terdiri dari KPKNL Banda Aceh sebanyak 310 NUP; dan KPKNL Lhokseumawe sebanyak 73 NUP.

Bea lelang merupakan bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenakan kepada penjual dan/atau pembeli atas pelaksanaan lelang. Penerimaan bea lelang mencerminkan tingkat aktivitas dan produktivitas pelaksanaan lelang. leh karena itu, realisasi bea lelang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja layanan lelang serta efektivitas upaya penggalan potensi lelang yang dilakukan. PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang terdiri atas: a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PL I diperoleh dari: 1) Bea lelang PL I; 2) Biaya permohonan lelang PL I 3) Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi PL I 4) Penerbitan kutipan

risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang PL I 5) Pembatalan Lelang b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PL II diperoleh dari: 1) Bea Lelang PL II 2) Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi PL II 3) Penerbitan kutipan risalah lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang (akun 425839) 4) Pemberian izin operasional Balai Lelang dan pembukaan kantor perwakilan Balai Lelang 5) Pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II (akun 99) 6) Kertas sekutiri untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	Indeks	100
Persentase realisasi pokok lelang	Persentase	100%
Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Persentase	100%

Sasaran Strategis 3 : Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum. Pada bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, IKU tersebut memperhitungkan tingkat efektivitas pembinaan pengelolaan BMN.

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; Pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; Penatausahaan; dan pengawasan dan pengendalian.

Pada tahun 2025, target Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi sebesar 74 setiap triwulannya, dengan realisasi tahunan sebesar 137,27 atau indeks capaian sebesar 120%. Perhitungan IKU ini meliputi komponen frekuensi pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan BMN, frekuensi pelaksanaan pembinaan Implementasi SIMAN v2, jumlah peserta pembinaan pengelolaan BMN, pelaksanaan penyelesaian optimalisasi SBSK, penyampaian laporan pembinaan Semester I, dan penyampaian laporan pembinaan Semester II.

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks	77
Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	74
Tingkat kompetensi penilai pemerintah	Indeks	70

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)

Berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini terdiri dari 5 sasaran strategis yaitu Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan, Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif, Indeks kualitas kinerja anggaran, Penanganan hukum dan komunikasi public yang efektif, Pengawasan dan pengendalian internal serta manajemen risiko yang efektif..

Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif

Menurut Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND. Selain itu, yang

termasuk kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya dan pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektivitas, efisiensi, dan penerimaan negara.

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	Persentase	100%
Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Persentase	100%

Sasaran Strategis 5 : Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

IKU Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan

telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

Pelayanan Penilaian yang akuntabel dan profesional diukur melalui layanan Penilaian yang tepat waktu, basis data dan hasil penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang. Sasaran strategis ini mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Persentase realisasi penyelesaian BKPN	Persentase	100% (24,4 BKPN)
Tingkat kualitas layanan penilaian	Persentase	70%
Persentase Produktivitas Lelang	Persentase	80%

Sasaran Strategis 6 : Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja, tidak hanya dari sisi penyerapan dana, tetapi juga kualitas perencanaan dan pelaksanaannya. Nilai IKPA mencerminkan kinerja keuangan satuan kerja, di mana nilai tinggi menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik, sedangkan nilai rendah mengindikasikan adanya masalah. Tantangan dalam pencapaiannya meliputi kualitas SDM, dinamika kebijakan, dan koordinasi pelaksanaan. Penguatan perencanaan, peningkatan koordinasi, serta pemanfaatan platform digital seperti SAKTI, MONSAKTI, dan OM-SPAN menjadi kunci dalam mendukung pengelolaan anggaran yang lebih baik dan tepat sasaran.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 dilakukan melalui dua komponen utama yaitu Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dan Indikator Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Hasil pemenuhan kedua komponen tersebut kemudian dikonversi menjadi persentase capaian IKU berdasarkan bobot yang telah ditetapkan dalam pedoman pengukuran.

Pengembangan kompetensi pegawai merupakan salah satu upaya strategis dalam menjamin tersedianya sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Kegiatan ini bervariasi mulai dari kegiatan pelatihan, penataran, workshop, sosialisasi, seminar, sharing session, outbond, belajar mandiri, coaching, mentoring, job shadowing, dan lain sebagainya. Pada tahun 2025, Kanwil DJKN Aceh melaksanakan pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan dua komponen utama, yaitu:

1. Komponen Pemenuhan minimal 25 Jam Pelatihan (JP) per pegawai.
2. Komponen Pemenuhan panggilan pelatihan (pemanggilan dan pemenuhan).

Sasaran Strategis 7 : Penanganan hukum dan komunikasi public yang efektif

Penyediaan layanan informasi dan referensi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meningkatkan efektivitas penyediaan layanan data/informasi bagi masyarakat umum mengenai Kemenkeu. Layanan Informasi Publik diatur dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Layanan informasi yang andal adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan contact center dengan penyediaan kualitas.

informasi yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta bebas dari pengertian yang menyesatkan. Layanan informasi yang tepat waktu adalah pemberian layanan informasi bagi pemangku kepentingan yang menggunakan layanan contact center sesuai dengan service

level agreement yang disepakati sebagai komitmen layanan untuk pemangku kepentingan.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai komunikasi publik yang efektif adalah peningkatan kapabilitas dan tata Kelola kehumasan. IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan untuk Kantor Wilayah, terdiri dari 2 unsur pengukuran, di antaranya:

1. Partisipasi Agenda Setting;
2. *Employee Advocacy*.

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	Indeks	3,55
Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	Indeks	80

Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta manajemen resiko yang efektif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Penilaian tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu, nilai maturitas penyelenggaraan.

SPIP yang baik serta memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan tugas UKI apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan KMK Nomor 395/KM.1/2025 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan, kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pra-evaluasi;
- b. Desk evaluation;
- c. Validasi survei;
- d. Wawancara dan evaluasi lapangan;
- e. Clearance internal dan eksternal;
- f. Pleno Tim Penilai Kementerian (TPK); dan
- g. Penetapan hasil pemantauan dan evaluasi ZI-WBK/WBBM.

Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bentuk wujud sebagai upaya dan komitmen Unit Kerja dalam mempertahankan predikat ZI-WBK/WBBM dan terus meningkatkan penguatan integritas serta kualitas pemberian layanan sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang termuat dalam KMK Nomor 395/KM.1/2025 sehingga kegiatan pembangunan ZI-WBBM dan/atau pemantauan dan evaluasi keberlanjutan ZIWBK/WBBM pada periode mendatang dapat berjalan optimal.

Sasaran strategis ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam tabel.

Indikator Kinerja	Satuan	Target
Indeks Kualitas manajemen kinerja dan risiko	Indeks	80

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Proses Penyusunan

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 mempertimbangkan rancangan Renstra terbaru, prioritas nasional, serta evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Untuk Perjanjian Kinerja Kanwil DJKN Aceh telah mengacu pada draf Renstra tahun 2025-2029.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Aceh tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Aceh adalah sebesar 115,61%, dengan rincian nilai pada masing-masing perspektif sebagai berikut :

Selama tahun 2025, semua Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJKN Aceh berjumlah 18 IKU. Seluruh IKU tersebut berstatus hijau (sesuai ekspektasi)

Berikut penjelasan dari setiap capaian IKU yang merupakan evaluasi dan analisis kinerja atas 18 IKU yang dicapai Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2025 sesuai dengan *Strategy Map* Kemenkeu-*Two* Kanwil DJKN Aceh.

1a-CP Indeks Integritas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Indeks Integritas	89,37	94,12	105,32%

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu. Adapun penilaian terhadap Indeks Integritas Pegawai Kanwil DJKN Aceh Tahun 2025 sebesar 105,32 dari target sebesar 89,37.

1b-CP Persentase dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Realisasi penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	27.489.000.000	31.868.304.021	115,93%

Sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dapat dikatakan optimal apabila kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Lain-lain, Kekayaan Negara Dipisahkan, Piutang Negara, dan Lelang terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya, sehingga mampu meningkatkan kontribusi penerimaan negara

Realisasi Penerimaan Negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang khususnya PNBP Aset di lingkungan Kanwil DJKN Aceh Tahun 2025, dari Target sebesar Rp27.489.000.000,00 berhasil memperoleh realisasi sebesar Rp31.868.304.021. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 115,93%.

Nilai penerimaan negara dari PNBP Aset berasal dari:

- penerimaan dari hasil **pemanfaatan** Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL serta telah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.
- penerimaan dari hasil **pemindahtanganan** Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan
- penerimaan dari hasil penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan oleh Pengadilan.

Nilai penerimaan negara dari PNBP Piutang Negara berasal dari :

Secara umum, capaian PNBP Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PN) di lingkungan Kanwil DJKN Aceh senantiasa melampaui

target triwulan yang ditetapkan. Pada KPKNL Banda Aceh, realisasi PNBP Biad PN didominasi oleh pembayaran cicilan sebanyak 12 kali dari debitur LUEP KP Metuah Baroe dengan total kontribusi sebesar Rp8.727.276 atau setara dengan 76% dari total PNBP Biad PN yang terealisasi. Sementara itu, pada KPKNL Lhokseumawe, kontribusi terbesar berasal dari cicilan sebanyak 7 kali yang dilakukan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan dengan nilai sebesar Rp50.000.002 atau mencapai 83,6% dari total realisasi PNBP Biad PN. Upaya yang dilakukan untuk memastikan realisasi PNBP Biad PN secara konsisten melampaui target antara lain dengan menjaga komitmen debitur dalam memenuhi kewajibannya, melakukan pemantauan pembayaran dan menghubungi debitur secara rutin apabila terjadi keterlambatan pembayaran, serta melaksanakan kunjungan langsung ke lokasi debitur guna mengonfirmasi kesanggupan dan komitmen pembayaran. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kepatuhan debitur dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Nilai penerimaan negara dari PNBP Lelang berasal dari PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang terdiri atas:

K-One	1 - Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya						
	1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
Target	Rp3.500.000	Rp7.000.000	Rp7.000.000	Rp10.500.000	Rp10.500.000	Rp14.000.000	Rp14.000.000
Realisasi	Rp25.663.638	Rp53.659.168	Rp53.659.168	Rp65.750.082	Rp65.750.082	Rp71.215.995	Rp71.215.995
Capaian	733%	767%	767%	629%	629%	509%	509%
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120

a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PL I diperoleh dari:

- 1) Bea lelang PL I;
- 2) Biaya permohonan lelang PL I
- 3) Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi PL I
- 4) Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang PL I
- 5) Pembatalan Lelang

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PL II diperoleh dari:

- 1) Bea Lelang PL II
- 2) Penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi PL II
- 3) Penerbitan kutipan risalah lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang (akun 425839)

- 4) Pemberian izin operasional Balai Lelang dan pembukaan kantor perwakilan Balai Lelang
- 5) Pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II (akun 99)
- 6) Kertas sekutiri untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II.

Adapun rincian PNBP dari lelang tahun 2025 pada Kanwil DJKN Aceh sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Target	Capaian	Kinerja
1.	KPKNL Banda Aceh	2.465.500.000	2.425.419.007	97,97%
2.	KPKNL Lhokseumawe	2.000.000.000	1.840.800.108	81,17%
3.	Kanwil DJKN Aceh (PL II)	20.500.000	396.607.480.000	1.934,67%
4.	Total Kanwil DJKN Aceh	4.486.000.000	4.652.826.595	103,72%

Pada tahun 2025, kinerja lelang Kanwil DJKN Aceh mengalami peningkatan capaian. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan kinerja Pejabat Lelang Kelas II. Dalam rangka penggalan potensi lelang, Kanwil DJKN Aceh telah melakukan beberapa upaya, antara lain telah melakukan monitoring terhadap Balai Lelang yang menyelenggarakan lelang terhadap objek yang berada di luar kota/kabupaten tempat kedudukan Balai Lelang, khususnya yang menyelenggarakan lelang atas objek lelang yang berada di wilayah Aceh, dan selanjutnya menyurati Kantor Wilayah DJKN selaku superintendent dan Balai Lelang yang bersangkutan untuk dapat menyelenggarakan lelang sesuai kewenangan. Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah DJKN selaku superintendent dan Balai Lelang yang bersangkutan, sehingga terjalin kerja sama antara Pejabat Lelang Kelas II Aceh dan beberapa Balai Lelang yang menyebabkan adanya peningkatan pada realisasi PNBP Pejabat Lelang Kelas II secara signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Namun demikian, peningkatan capaian tersebut tidak diikuti oleh Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL. Capaian kinerja masing-masing KPKNL berada

pada kisaran 90%. Meskipun belum mencapai target secara optimal, capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 50% dari target yang ditetapkan.

Belum optimalnya capaian Pejabat Lelang Kelas I antara lain disebabkan oleh keterbatasan jumlah objek lelang yang siap dilaksanakan, ketergantungan pada pengajuan lelang dari para pemangku kepentingan, serta masih adanya kendala administratif dan hukum pada objek lelang. Selain itu, tingkat partisipasi dan minat peserta lelang di beberapa wilayah belum merata, sehingga mempengaruhi realisasi target lelang. Selain faktor internal, penurunan capaian lelang di Aceh juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa bencana banjir hidrometeorologi. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya partisipasi peserta lelang serta timbulnya kendala dalam pelaksanaan aanwijzing akibat terputusnya akses jalan menuju lokasi objek lelang, sehingga berdampak pada penurunan capaian kinerja lelang di wilayah Aceh.

Berdasarkan uraian di atas capaian IKU realisasi PNBP pada Kanwil DJKN Aceh dan KPKNL Banda Aceh serta KPKNL Lhokseumawe dengan metode konsolidasi raw data adalah sebesar Rp36.374.952.647,00 dari target sebesar Rp31.989.000.000,00 atau dalam capaian persentase sebesar 113,71% dengan rincian per masing-masing komponen, sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi per komponen capaian Penerimaan dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2024 dan 2025

Capaian 2025

Total Realisasi dan Persentase Capaian Penerimaan Negara		Target	Realisasi	Indeks Capaian
		Rp 31.989.000.000,00	Rp 36.374.952.647,00	113,71%
PNBP Aset	Kanwil DJKN Aceh	Rp 27.489.000.000,00	Rp 31.868.304.021,00	115,93%
	KPKNL Banda Aceh	Rp 18.100.000.000,00	Rp 18.241.513.096,00	100,78%
	KPKNL Lhokseumawe	Rp 9.389.000.000,00	Rp 13.626.790.925,00	145,14%
PNBP Piutang Negara	Kanwil DJKN Aceh	Rp 14.000.000,00	Rp 71.215.995,00	508,69%
	KPKNL Banda Aceh	Rp 8.000.000,00	Rp 11.415.919,00	142,70%
	KPKNL Lhokseumawe	Rp 6.000.000,00	Rp 59.800.076,00	996,67%
PNBP Lelang	Kanwil DJKN Aceh	Rp 4.486.000.000,00	Rp 4.435.432.631,00	98,87%
	KPKNL Banda Aceh	Rp 2.465.500.000,00	Rp 2.415.419.007,00	97,97%
	KPKNL Lhokseumawe	Rp 2.000.000.000,00	Rp 1.623.406.144,00	81,17%
	Kanwil DJKN Aceh (PL II)	Rp 20.500.000,00	Rp 396.607.480,00	1934,67%

Capaian 2024

Jenis Capaian	Target	Realisasi
Capaian PNBPN Aset	Rp. 23.351.000.000	Rp. 29.347.057.379
Capaian PNBPN PN	Rp. 19.600.000	Rp. 88.289.629,58
Capaian PNBPN Lelang	Rp. 8.271.000.000	Rp. 4.672.261.193
Total	Rp. 31.641.600.000	Rp. 34.107.608.201,58

Perbandingan pencapaian target dan realisasi Tahun 2025 dengan Tahun 2024 secara presentase target terdapat rentang perbedaan, namun realisasi Tahun 2025 masih mampu melampaui target yang ditetapkan. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang, dalam proses pelaksanaan masih terdapat kendala-kendala, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman dari satuan kerja atas peraturan barang milik negara (BMN) terkait, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN; dan
2. Satuan Kerja melaksanakan pemanfaatan tanpa persetujuan Pengelola Barang.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada Tahun 2025 dengan melakukan:

1. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan BMN kepada satuan kerja terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
2. *Monitoring* dan evaluasi pemanfaatan BMN melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN; dan

Pembinaan kepada Satuan Kerja melalui surat untuk melaksanakan penjualan BMN dalam kondisi RB melalui lelang

Mengingat IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai korelasi yang erat dengan aktivitas kantor pelayanan (KPKNL), maka Bidang Teknis di Kanwil harus terus melakukan pemantauan, bimbingan/asistensi dan mitigasi secara berkesinambungan guna menghindari tidak tercapainya capaian kinerja yang telah ditentukan. Namun demikian telah dilakukan tindakan atas hal dimaksud, yaitu:

1. Melaksanakan FGD dan atau monev pengelolaan aset
2. Bimbingan asistensi dan penggalian potensi lelang ke KPKNL

Banda Aceh dan Lhokseumawe

3. Melakukan koordinasi ke KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe.

Rekomendasi rencana Aksi:

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan satker untuk melakukan optimalisasi pengelolaan BMN
2. Melakukan bimbingan/asistensi ke KPKNL dalam rangka penggalian potensi piutang negara
3. Melakukan koordinasi dengan KPKNL untuk mengelola pelayanan lelang

2a-CP Tingkat Optimalisasi pengelolaan asset negara

Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara merupakan IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) pada tahun sebelumnya. SBSK merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Bentuk Optimalisasi Pengelolaan BMN sesuai PP 27 Tahun 2014 jo. PP 28 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan BMN
2. Pemanfaatan BMN
3. Optimalisasi lainnya sesuai PP 27 Tahun 2014 jo. PP 28 tahun 2020, antara lain: penyerahan ke pengelola sebagai BMN Idle, Rehabilitasi untuk BMN Rusak Berat (RB), dan Penghapusan.

Dalam proses pengukuran NUP untuk mengukur tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara di lingkup Kanwil DJKN Aceh terdiri dari tanah bangunan kantor, bangunan gedung kantor, tanah rumah negara, dan tanah mess/asrama.

Pada Tahun 2025 target Kanwil DJKN Aceh sebanyak 383 NUP terdiri dari KPKNL Banda Aceh sebanyak 310 NUP; dan KPKNL Lhokseumawe sebanyak 73 NUP.

Berikut data capaian Tingkat optimalisasi pengelolaan asset negara tahun 2025 dan 2024

2025

K-Two	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	2c-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/TL KV
Realisasi	124,48%	81,67%	81,67%	85,65%	85,65%	100,75%	100,75%	
Capaian	120%	120%	120%	107,06%	107,06%	115,93%	100,75%	

2024

K-Two	SS.2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2a-N	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Average
Realisasi		157%	144,37%	144,37%	144,37%	110,71%	110,71%	Average
Capaian		120%	120%	120%	120%	110,71%	110,71%	Average

2b-CP Persentase realisasi pokok lelang

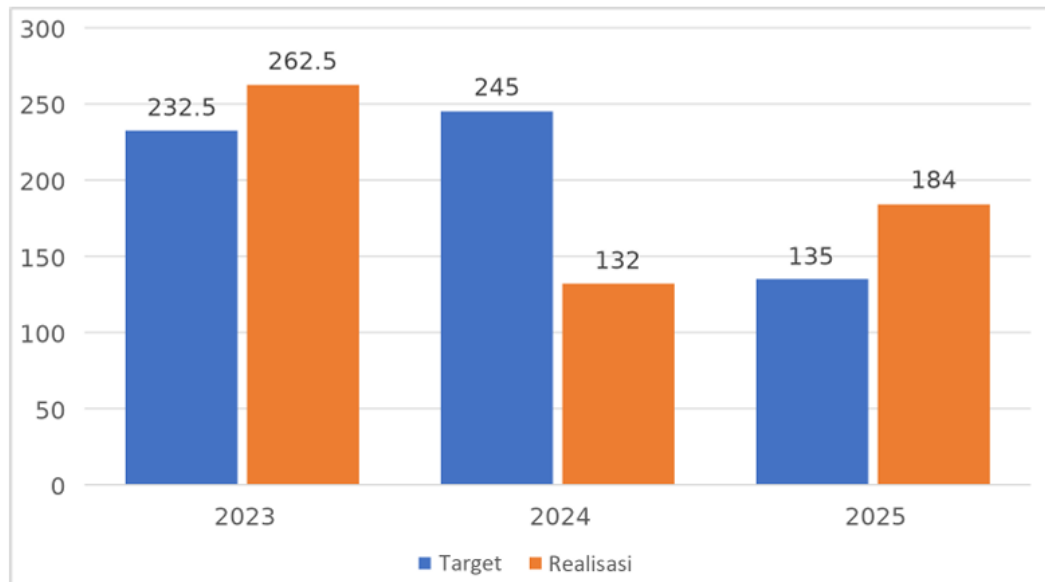
Data capaian realisasi pokok lelang 2025

No	Unit Kerja	Target	Capaian	Kinerja
1.	KPKNL Banda Aceh	Rp76.530.000.000	Rp66.417.833.748	86,79%
2.	KPKNL Lhokseumawe	Rp50.000.000.000	Rp54.479.966.997	108,96%
3.	Kanwil DJKN Aceh (PL II)	Rp8.956.823.000	Rp63.660.346.000	710,75%
4.	Total Kanwil DJKN Aceh	Rp135.486.823.000	Rp184.558.146.745	136,22%

Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Aceh tahun 2025 adalah sebesar Rp135.486.823.000 dengan distribusi target sebagai berikut. Pada tahun 2025, kinerja lelang Kanwil DJKN Aceh mengalami peningkatan capaian. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan kinerja Pejabat Lelang Kelas II. Dalam rangka penggalian potensi lelang, Kanwil DJKN Aceh telah melakukan beberapa upaya, antara lain antara lain telah melakukan monitoring terhadap Balai Lelang yang menyelenggarakan lelang terhadap objek yang berada di luar kota/kabupaten tempat kedudukan Balai Lelang, khususnya yang menyelenggarakan lelang atas objek lelang yang berada di wilayah Aceh, dan selanjutnya menyurati Kantor Wilayah DJKN selaku superintendent dan Balai Lelang yang bersangkutan untuk dapat menyelenggarakan lelang sesuai kewenangan. Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah DJKN selaku superintendent dan Balai Lelang yang bersangkutan, sehingga terjalin kerja sama antara Pejabat Lelang Kelas II Aceh dan beberapa Balai Lelang. Upaya peningkatan kinerja lelang tersebut turut didukung dengan kegiatan penyebaran informasi dan sosialisasi layanan lelang kepada masyarakat melalui kegiatan Lelang on The Road yang dilaksanakan sebanyak tiga kali. Kendati demikian, masih terdapat kendala berupa gangguan pada Portal Lelang Generasi 2 yang dikeluhkan oleh pengguna layanan lelang. Menindaklanjuti hal tersebut, Bidang Lelang bersama KPKNL secara berkelanjutan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Portal Lelang Generasi 2 guna meminimalkan permasalahan yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Kanwil DJKN Aceh juga telah menyediakan hotline khusus layanan lelang kepada stakeholder yang mengalami kendala melalui aplikasi whatsapp. Selain itu, pada awal tahun telah dilakukan kegiatan sosialisasi terkait implementasi Portal Lelang Generasi 2 kepada Stakeholder Lelang. Dalam rangka meningkatkan kemudahan akses serta keterbukaan informasi mengenai objek lelang, Kanwil DJKN Aceh juga melakukan inovasi dengan menetapkan pedoman pencantuman deskripsi/uraian objek lelang pada Portal Lelang sesuai dengan KEP-53/WKN.01/2025 tentang Standardisasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Verifikasi Portal Lelang di lingkungan Kanwil DJKN Aceh. Penetapan standar dan SOP tersebut diharapkan dapat menciptakan keseragaman

kualitas uraian objek lelang, sehingga calon pembeli memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas mengenai objek lelang.

Perbandingan capaian pokok lelang Kanwil DJKN Aceh tahun 2023, 2024, dan 2025 sebagai berikut:



2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang

K-One	2 - Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal						
	2b-CP Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
Target	Rp70.000.000	Rp245.000.000	Rp245.000.000	Rp495.000.000	Rp495.000.000	Rp2.588.146.000	Rp2.588.146.000
Realisasi	Rp1.652.890.273	Rp2.264.240.259	Rp2.264.240.259	Rp2.499.236.498	Rp2.499.236.498	Rp3.299.599.954	Rp3.299.599.954
Capaian	2.631%	924%	924%	505%	505%	128%	128%
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120

Capaian penurunan saldo Piutang Negara (PN) pada Kanwil DJKN Aceh secara konsisten menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi yang selalu melampaui target sejak triwulan pertama. Pada triwulan keempat, dilakukan amandemen target penurunan saldo PN yang semula ditetapkan sebesar Rp820.000.000 menjadi Rp2.588.146.000. Meskipun terjadi peningkatan target yang signifikan, Kanwil DJKN Aceh tetap mampu mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas ambang batas optimal, yaitu sebesar 128%, sehingga nilai

kinerja yang diperoleh mencapai angka maksimal sebesar 120. Di KPKNL Banda Aceh, kontribusi penurunan saldo PN terbesar berasal dari Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) diserahkan oleh DJKN eks BPPN, dengan nilai sebesar Rp563.823.595,34 atau 54% dari total realisasi. Sementara itu, di KPKNL Lhokseumawe, kontribusi terbesar penurunan saldo PN dari penyerah piutang LPDB-KUMKM sebesar Rp776.598.599 atau 34% dari seluruh penurunan saldo PN di KPKNL Lhokseumawe. Untuk mendukung pencapaian target IKU tersebut, berbagai upaya strategis telah dilakukan, antara lain menjaga dan memperkuat komitmen debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, melaksanakan pengembalian BKPN kepada penyerah piutang yang tidak dapat menunjukkan dokumen asli pengurusan PN, serta melengkapi pengurusan dokumen pendukung Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) melalui pernyataan resmi dari Polda Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dan Kepala Gampong setempat.

3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan

3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77,00	93,26	14,00%	33,33%	121,12	120,00
------	----------------------------------	-----	-----	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada PERMENPAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei kepuasan Masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik.

3b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

K-Two	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-N Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/AV R
Realisasi	179,79%	138,74	138,74	170	170	119,97	119,97	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja								

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum. Pada bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, IKU tersebut memperhitungkan tingkat efektivitas pembinaan pengelolaan BMN.

Pada tahun 2025, target Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi sebesar 74 setiap triwulannya, dengan realisasi tahunan sebesar 119,97 atau indeks capaian sebesar 120%. Perhitungan IKU ini meliputi komponen frekuensi pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan BMN, frekuensi pelaksanaan pembinaan Implementasi SIMAN v2, jumlah peserta pembinaan pengelolaan BMN, pelaksanaan penyelesaian optimalisasi SBSK, penyampaian laporan pembinaan Semester I, dan penyampaian laporan pembinaan Semester II.

Pada tahun 2025, KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe telah melaksanakan edukasi dan komunikasi terkait layanan lelang kepada stakeholder lelang di wilayah kerja masing-masing KPKNL dan telah melakukan survey pelaksanaan edukasi dan komunikasi sebagai alat untuk mengukur tingkat pemahaman stakeholder lelang dengan hasil realisasi sebesar 96,65% dari target 74% sehingga indeks capaian realisasi efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 131% dari target.

3c-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah

3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	Max	P/M	70,00	85,60	14,00%	33,33%	122,29	120,00	40,00
------	---------------------------------------	-----	-----	-------	-------	--------	--------	--------	--------	-------

Dilakukan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal kekayaan Negara/Bultek di bidang Penilaian oleh Kanwil DJKN dengan peserta Penilai Pemerintah di lingkungan Kanwil DJKN. Pelaksanaan sosialisasi tersebut diukur apakah informasi dari peraturan yang disosialisasikan telah tersampaikan dengan benar sesuai dengan harapan dari penyusun peraturan tersebut. Penilai Pemerintah Non DJKN juga punya pemahaman yang sama terkait penerapan peraturan di bidang penilaian sehingga terwujud pembinaan yang optimal melalui salah satunya pelaksanaan sosialisasi peraturan atau pun bimtek yang dilakukan oleh Kanwil DJKN.

4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

K-Two	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
Realisasi	19,57%	81,47%	81,47%	118,05%	118,05%	134,42%	134,42%	Max/TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	√

Di Tahun 2025, Kanwil DJKN Aceh mendapatkan target penyelesaian Program Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah (Program Sertifikasi BMN) sebanyak 1.252 rekomendasi bidang tanah. Mengingat besarnya jumlah target Program Sertifikasi BMN yang harus diselesaikan tersebut, Kanwil DJKN Aceh perlu melakukan langkah-langkah progresif koordinatif untuk memastikan penyelesaian target dalam waktu yang ditentukan. Sebagai upaya percepatan Program Sertifikasi BMN Tahun 2025, KPKNL Banda Aceh dan Lhokseumawe telah berkoordinasi dengan seluruh satker yang terlibat agar segera melengkapi dan menyerahkan berkas permohonan sertifikasi BMN.

Menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut, beberapa satker telah menyerahkan berkas permohonan ke KPKNL untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, berkas permohonan disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk dilakukan tahapan selanjutnya yaitu pengukuran. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses penyelesaian Program Sertifikasi BMN, berkas-berkas tersebut perlu segera diserahkan ke Kantor Pertanahan untuk ditindaklanjuti.

Dalam setiap kegiatan tentu tidak terlepas dari kendala baik kendala internal maupun kendala eksternal. Demikian juga pada pelaksanaan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah pada K/L tahun 2025 di Provinsi Aceh, terdapat berbagai kendala yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah pada K/L tahun 2025 di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan	Detail Kendala dan Permasalahan
1.	Akun Mitra Kementerian/Lembaga	Adanya transisi Kementerian/Lembaga disebabkan pembentukan Kabinet Merah Putih sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024 –2029 sehingga dilakukan penyesuaian akun mitra ATR/BPN satuan kerja berdasarkan Kementerian/Lembaga terkait

2.	Efisiensi dan Pemblokiran Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi anggaran yang terjadi di setiap Kementerian/Lembaga menyebabkan tidak tersedianya mata anggaran kegiatan sertipikasi BMN tanah. Dalam rangka mendukung kegiatan sertipikasi BMN, satuan kerja menggunakan mata anggaran kegiatan lainnya; 2. Selama tahun anggaran 2025, terdapat dinamika pelaksanaan sertipikasi BMN tanah yaitu pemblokiran anggaran kegiatan Sertipikasi BMN pada Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Sumber Daya Air. Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera I sebagai satuan kerja vertikal tidak dapat melaksanakan kegiatan sertipikasi BMN secara optimal. Pendanaan kegiatan sertipikasi dilakukan pada sebagian bidang tanah dengan penganggaran DIPA Kanwil DJKN Aceh dan KPKNL Banda Aceh
3.	Penyerahan hasil pengadaan bidang tanah jalan tol	Dokumen penyerahan hasil pengadaan bidang tanah jalan tol oleh Kantor Pertanahan sebagai dokumen persyaratan pengajuan sertipikasi BMN diselesaikan pada pertengahan tahun pelaksanaan program sertipikasi BMN.
4.	Bencana alam yaitu banjir dan tanah longsor	Adanya force majeure yaitu bencana alam banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh pada bulan November – Desember 2025 menyebabkan BMN baik tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan mengalami kerusakan. Dampak tersebut menyebabkan satuan kerja dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota masih berfokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi BMN guna pemulihan kegiatan operasional.
5.	Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen bukti perolehan tanah atau dokumen pelepasan hak tidak ada/hilang 2. Bidang tanah yang diajukan oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga untuk disertipikatkan telah bersertipikat, sehingga tidak dapat diproses melalui program percepatan pensertipikatan BMN

4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN

K- <i>Two</i>	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio BMN)							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	S.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/TLKV
Realisasi	39,19%	51,72%	51,72%	72%	72%	93,91%	93,91%	
Capaian	120%%	120%	120%	120%	120%	117,39%	117,39%	

Tahun 2025, realisasi kinerja atas IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio BMN) Kanwil DJKN Aceh sebesar 93,91% dari target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga capaian pada IKU tersebut sebesar 117,39%. IKU ini memperhitungkan komponen Evaluasi Kinerja Aset dan Disampaikan Rekomendasinya (50%) dengan target 1.142 NUP dan komponen Tindak Lanjut Rekomendasi (50%) dengan target 58 Paket.

Total realisasi komponen evaluasi kinerja BMN dan disampaikan rekomendasinya (80%), pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2025 yakni:

1. Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya sebanyak 1.235 NUP; dan
2. Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker sebanyak 140 Paket.

5a-CP Persentase realisasi penyelesaian BKP

K-One	5 - Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif						
	5a-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara						
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
Target	8	13	13	17	17	24,4	24,4
Realisasi	11	16,6	16,6	21	21	31	31
Capaian	138%	128%	128%	124%	124%	127%	127%
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120

Kanwil DJKN Aceh senantiasa melampaui target sejak awal triwulan tahun 2025. Pada triwulan keempat terdapat amandemen target dari sebelumnya 22 menjadi 24,4. Walaupun terdapat kenaikan target, Kanwil DJKN Aceh tetap mampu melampaui target hingga 127% dan memperoleh nilai kinerja 120. Penyelesaian BKP terbanyak di KPKNL Banda Aceh atas BKP dari Penyerah Piutang DJKN eks BPPN sebesar 8,9 (67%). Penyelesaian BKP terbanyak di KPKNL Lhokseumawe atas BKP dari Penyerah Piutang KLHK sebesar 6,6 (37%). Upaya yang dilakukan untuk mencapai penyelesaian BKP yang optimal antara lain dengan melakukan pengembalian BKP kepada penyerah piutang yang tidak dapat menunjukkan dokumen asli pengurusan PN, serta melengkapi pengurusan dokumen pendukung Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) melalui pernyataan resmi dari Polda Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dan Kepala Gampong setempat.

5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian

Sasaran Strategis	Nomor IKU	Nama IKU	Target Triwulan IV	Realisasi
Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Proaktif	5b_CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	70	108,17

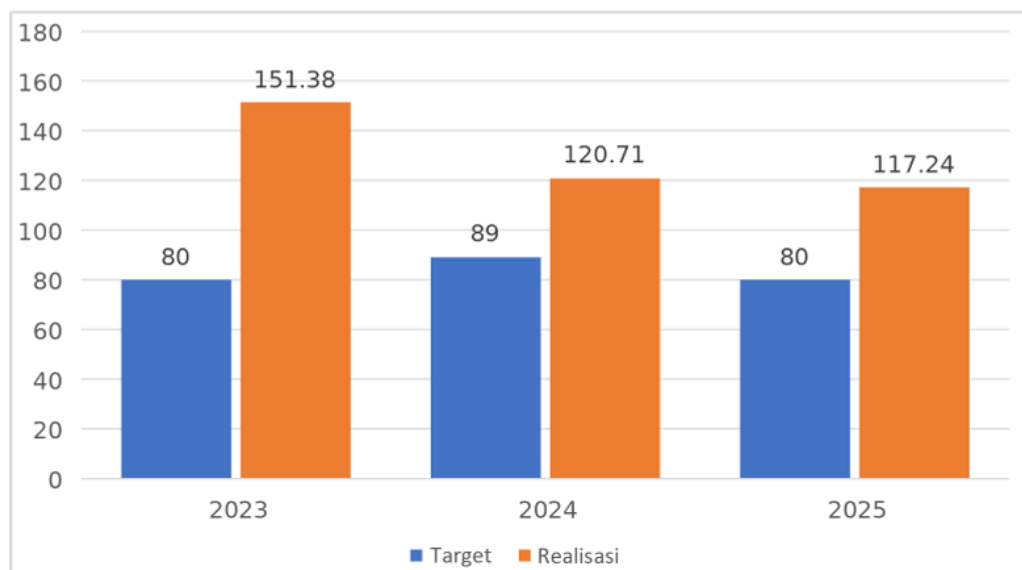
Pelayanan Penilaian yang akuntabel dan profesional diukur melalui layanan Penilaian yang tepat waktu, basis data dan hasil penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

5c-CP Persentase produktivitas lelang

IKU ini mengukur tingkat produktivitas lelang dinilai dari persentase lot lelang laku lelang yang laku per jenis lelang. Adapun untuk Tahun 2025, Kanwil DJKN Aceh berhasil meraih capaian realisasi hingga 120 melampaui target dari 80%, dengan capaian kinerja sebesar 120%.

5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80,00%	117,24%	14,00%	33,33%	146,56	120,00	40,00
-------	---------------------------------	-----	-----	--------	---------	--------	--------	--------	--------	-------

Tabel Perbandingan capaian produktivitas lelang Kanwil DJKN Aceh tahun 2023, 2024, dan 2025 sebagai berikut



6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran

Indikator IKU Indeks Kinerja Anggaran		Capaian s.d Triwulan IV
A. Nilai IKPA		99.94%
1	Revisi DIPA	10%
2	Deviasi Hal III DIPA	15%
3	Belanja Kontraktual	0%
4	Pengelolaan UP dan TUP	9.96%
5	Penyerapan Anggaran	20%
6	Penyelesaian Tagihan	0%
7	Capaian Output	25%
B. Nilai SMART		100%
Nilai Capaian IKU IKA s.d Triwulan IV		120%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja, tidak hanya dari sisi penyerapan dana, tetapi juga kualitas perencanaan dan pelaksanaannya. Nilai IKPA mencerminkan kinerja keuangan satuan kerja, di mana nilai tinggi menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik, sedangkan nilai rendah mengindikasikan adanya masalah. Tantangan dalam pencapaiannya meliputi kualitas SDM, dinamika kebijakan, dan koordinasi pelaksanaan. Penguatan perencanaan, peningkatan koordinasi, serta pemanfaatan platform digital seperti SAKTI, MONSAKTI, dan OM-SPAN menjadi kunci dalam mendukung pengelolaan anggaran yang lebih baik dan tepat sasaran. Untuk tahun 2025 Kanwil DJKN mempunyai pagu anggaran sebesar 1.992.005.000,- dengan nilai realisasi sebesar 1.956.870.027,- atau 98,24 %.

1. Isu Utama

Belanja Barang : Adanya kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan efisiensi anggaran
 Belanja Modal : Terdapat revisi top up anggaran belanja modal yang dilakukan mendekati akhir tahun anggaran, sehingga waktu yang tersedia untuk tahapan persiapan dan pelaksanaan menjadi sangat terbatas

2. Rencana Tindakan

Belanja Barang : Mengoptimalkan rencana kegiatan beserta anggaran yang tersedia dengan tetap memperhatikan capaian output dan outcome
 Belanja Modal : Pada periode berikutnya, apabila terdapat top

up belanja modal yang dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, Kanwil DJKN Aceh akan melakukan persiapan lebih awal guna memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan

3. Prestasi Tahun 2025,

Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Aceh mendapatkan piagam penghargaan terbaik 1 untuk penyusunan laporan keuangan tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran – wilayah Tahun 2024, kategori satker kecil, lingkup kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.

6b-N Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 dilakukan melalui dua komponen utama yaitu : Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dan Indikator Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Hasil pemenuhan kedua komponen tersebut kemudian dikonversi menjadi persentase capaian IKU berdasarkan bobot yang telah ditetapkan dalam pedoman pengukuran. Capaian IKU PBJ Kanwil DJKN Aceh – 96,5% Capaian Kanwil sebesar 96,5% menunjukkan bahwa unit telah mampu memenuhi hampir seluruh target tahunan. Nilai ini menggambarkan bahwa:

- Perencanaan dan pemutakhiran paket pada SIRUP telah dilakukan dengan baik,
- Pelaksanaan e-Purchasing dan proses tender berlangsung sesuai ketentuan,
- Pemenuhan komitmen belanja PDN berada pada level tinggi,
- Tidak terdapat kendala signifikan yang memengaruhi nilai tata kelola PBJ.

6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00
------	--	-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

Komponen I – Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

Pengukuran ITKP dilakukan berdasarkan nilai indeks tata kelola dengan rentang skala 0–100. Pembentukan nilai indeks dilakukan melalui pengukuran komponen pelaksanaan pengadaan, yaitu:

1. Perencanaan melalui SIRUP, dengan bobot $\pm 60\%$, mengukur ketepatan unit dalam:
 - o Menuangkan seluruh paket pengadaan dalam SIRUP, o

Konsistensi perencanaan terhadap realisasi, o Kepatuhan terhadap jadwal input.

2. Pelaksanaan melalui metode elektronik, meliputi: o E-Tendering, o E-Purchasing melalui Katalog Elektronik, o Non Tender/Non Purchasing, o E-Kontrak.

Bobot tiap komponen pelaksanaan mengacu pada pedoman LKPP/Biro PBJ Kemenkeu. Nilai akhir ITKP diperoleh dari penjumlahan bobot komponen dikurangi potensi pengurang apabila terdapat reklamasi, sengketa banding, atau temuan pemeriksaan terkait PBJ.

Komponen II – Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Komponen ini mengukur tingkat pemenuhan komitmen belanja PDN oleh unit kerja terhadap realisasi kontrak/pembayaran. Komponen yang diukur meliputi:

1. Nilai Komitmen PDN → nilai belanja PDN yang direncanakan,
2. Nilai Realisasi PDN → nilai belanja PDN yang terealisasi dalam kontrak/pembayaran,
3. Rasio Pemenuhan Komitmen = $(\text{Realisasi PDN} \div \text{Komitmen PDN}) \times 100\%$.

Selain itu, pengukuran dapat mempertimbangkan:

- Penggunaan TKDN minimal sesuai jenis komoditas,
- Pemanfaatan katalog lokal/umum,
- Proporsi penyedia dalam negeri. Unit dengan rasio $\geq 100\%$ memenuhi target pembelanjaan PDN.

3. Analisis Teknis Pelaksanaan Dari aspek teknis, capaian IKU PBJ 2025 menggambarkan: • Kepatuhan perencanaan PBJ melalui SIRUP berada pada tingkat baik, ditunjukkan oleh penerbitan paket pengadaan tepat waktu serta kesesuaian realisasi dengan perencanaan. • Kinerja pelaksanaan PBJ melalui katalog meningkat, dengan peningkatan volume paket PDN serta penggunaan penyedia dalam negeri. • Rasio pemenuhan belanja PDN memperlihatkan bahwa sebagian besar unit mampu mengonversi komitmen menjadi realisasi kontraktual, meskipun pada triwulan awal masih terdapat selisih antara komitmen dan realisasi karena proses pengadaan masih berjalan. • Nilai indeks ITKP pada umumnya berada pada kategori tinggi, yang menunjukkan proses

pengadaan telah memenuhi unsur efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

4. Temuan Teknis dan Area Perbaikan Area perbaikan yang relevan untuk tahun berjalan yaitu:
 1. Penyempurnaan perencanaan SIRUP pada triwulan I agar komitmen PDN tidak bergeser ke akhir tahun,
 2. Optimalisasi penggunaan katalog sektoral dan toko daring dalam pengadaan cepat,
 3. Penguatan dokumentasi dan pelaporan PBJ untuk menjaga integritas ITKP,
 4. Peningkatan koordinasi dengan penyedia lokal untuk mendorong realisasi.

6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Pengembangan kompetensi pegawai merupakan salah satu upaya strategis dalam menjamin tersedianya sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Kegiatan ini bervariasi mulai dari kegiatan pelatihan, penataran, workshop, sosialisasi, seminar, sharing session, outbond, belajar mandiri, coaching, mentoring, job shadowing, dan lain sebagainya, Pada tahun 2025, Kanwil DJKN Aceh melaksanakan pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan dua komponen utama, yaitu:

1. Komponen I: Pemenuhan minimal 25 Jam Pelatihan (JP) per pegawai.
2. Komponen II: Pemenuhan panggilan pelatihan (pemanggilan dan pemenuhan).

Data capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

No	Unit	Jumlah Pegawai	KOMPONEN I Jumlah Pegawai Memenuhi 25 JP	KOMPONEN II Pemenuhan Panggilan Pelatihan		Capaian I	Capaian II	Capaian IKU
				Pemanggilan	Pemenuhan			
1	Kanwil DJKN Aceh	37	37	15	18	100,00%	120,00%	104,00%
2	KPKNL Banda Aceh	28	28	18	18	100,00%	100,00%	100,00%
3	KPKNL Lhokseumawe	25	25	30	30	100,00%	100,00%	100,00%

1. Komponen I: Pemenuhan 25 JP

Pemenuhan minimal 25 JP merupakan kewajiban seluruh pegawai sebagai bagian dari pengembangan kompetensi tahunan. Berdasarkan data di atas: dapat disampaikan bahwa seluruh satuan kerja mencapai 100% pada indikator ini, dan tidak terdapat pegawai yang belum memenuhi ketentuan minimal jam pelatihan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pegawai dan dukungan organisasi yang baik dalam memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi.

2. Komponen II: Pemenuhan Panggilan Pelatihan Kinerja pada komponen ini menunjukkan efektivitas penugasan pelatihan serta partisipasi pegawai.

- Kanwil DJKN Aceh mencatat capaian 120%, menunjukkan adanya realisasi pelatihan yang melebihi jumlah panggilan (misalnya pelatihan mandiri atau tambahan).
- KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe mencapai 100%, menunjukkan kesesuaian antara pemanggilan dan pemenuhan. Tidak terdapat pemborosan panggilan (undangan yang tidak dihadiri), yang berarti mekanisme seleksi peserta pelatihan telah berjalan efektif.

Secara keseluruhan, capaian IKU pengembangan kompetensi Kanwil DJKN Aceh berada pada kategori "Sangat Baik"

A. Aspek Positif

1. Pemenuhan 25 JP mencapai 100% di seluruh unit.
2. Realisasi pelatihan mencapai target bahkan di atas target di unit Kanwil.
3. Seleksi dan penugasan peserta pelatihan berjalan efektif.

4. Terdapat budaya pembelajaran yang baik dan didukung oleh sistem pembelajaran berbasis teknologi.

B. Evaluasi

1. Penambahan jumlah pelatihan teknis sesuai kebutuhan DJKN seperti penilaian, lelang, dan PKN.

2. Optimalisasi program sertifikasi teknis maupun non-teknis.

3. Peningkatan jumlah kanal pelatihan mandiri (self-learning).

4. Penguatan monitoring learning path berbasis kebutuhan jabatan.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai khususnya di Kanwil DJKN Aceh pada Tahun 2025 berjalan dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh pemenuhan 25 Jam Pelatihan pada 100% pegawai di seluruh unit, tingkat pemenuhan pelatihan yang mencapai 100–120%, dan capaian IKU yang berada pada kisaran 100–104%. Kinerja tersebut mencerminkan kesiapan organisasi dalam menyediakan lingkungan pembelajaran sekaligus mencerminkan komitmen pegawai dalam meningkatkan kompetensi.

7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Seksi Informasi berada di bawah Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI). Berdasarkan peraturan tersebut, Seksi Informasi mempunyai tugas Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyajian informasi, dan hubungan kemasyarakatan.

Secara umum capaian kinerja Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2025 tergolong sangat baik dimana Kanwil DJKN Aceh berhasil meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,60%. Seluruh IKU berhasil mencapai target dengan rincian: 14 IKU mencapai indeks maksimal 120, dan 6 IKU berada di rentang 100–119. Capaian Seksi Informasi telah memenuhi ekspektasi (berstatus hijau) dengan pencapaian target dan realisasi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya.

7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	Max	P/M	3,55	4,88	14,00%	50,00%	137,33	120,00	60,00
-------	--	-----	-----	------	------	--------	--------	--------	--------	-------

7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Seksi Informasi berada di bawah Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI), Seksi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan tahunan.

IKU Indeks penanganan permasalahan hukum lingkup Kanwil DJKN Aceh mencapai capaian yang sangat signifikan yaitu 118,40 dibandingkan tahun sebelumnya 2024

7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100,00	118,40	14,00%	50,00%	118,40	118,40	59,20
------	--------------------------------------	-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two.

Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Tujuan strategis dari IKU tersebut yaitu untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Target Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Resiko pada Kanwil DJKN Aceh pada Tahun 2025 adalah 80 dan berhasil membukukan realisasi hingga akhir tahun 2025 yaitu sebesar 96,48. Oleh karena itu, perolehan capaian kinerja sebesar 120, %.

B. Realisasi Anggaran

Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran s.d Triwulan IV TA 2025

Indikator IKU Indeks Kinerja Anggaran		Capaian s.d Triwulan IV
A. Nilai IKPA		99.94%
1	Revisi DIPA	10%
2	Deviasi Hal III DIPA	15%
3	Belanja Kontraktual	0%
4	Pengelolaan UP dan TUP	9.96%
5	Penyerapan Anggaran	20%
6	Penyelesaian Tagihan	0%
7	Capaian Output	25%
B. Nilai SMART		100%
Nilai Capaian IKU IKA s.d Triwulan IV		120%

C. Kinerja Lain-Lain

Sebagai bentuk wujud upaya, semangat, dan partisipatif aktif atas kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi, Selama Tahun 2025 ini Kanwil DJKN Aceh memperoleh penghargaan-penghargaan sebagai berikut:

1. Piagam Penghargaan Sebagai PPID Tingkat II Kategori Informatif Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat II di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025;
2. Piagam Penghargaan PROAKSI Awards 2024 Nomor : PA-106/KPN.0101/2025 Satker Tahun Anggaran 2024 TERBAIK I
3. Piagam Penghargaan PROAKSI Awards 2024 Nomor : PA-016/KPN.0101/2025 Satker Dengan Penggunaan CMS – Pagu Kecil TERBAIK I.
4. Piagam Penghargaan PROAKSI Award 2024 Nomor : PA-090/KPN.0101/2025 Satker Dengan IKPA Nilai Sempurna (100) – Bobot 100% TERBAIK III.

5. Piagam Penghargaan KANWIL DITJEN KEKAYAAN NEGARA PROVINSI ACEH sebagai Terbaik I Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah Kategori Satker Kecil Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh Tahun 2024.
6. Piagam Penghargaan PROAKSI Awards 2024 Nomor : PA-068/KPN.0101/2025 Satker Dengan IKPA – Pagu Kecil TERBAIK II.
7. Piagam Penghargaan PROAKSI Awards 2024 Nomor: PA-036/KPN.0101/2024 Satker Dengan Penggunaan Didipay – Pagu Kecil TERBAIK III.
8. Piagam Penghargaan PROAKSI Awards 2024 Nomor : PA-025/KPN.0101/2025 Satker Dengan Implementasi KKP – Pagu Kecil TERBAIK I.
9. Piagam Penghargaan PROAKSI Awards 2024 Nomor : PA-097/KPN.0101/2025 Satker Dengan Kecepatan Pengiriman Dan Kualitas LK TERBAIK I.
10. Piagam Penghargaan PROAKSI Awards 2024 Nomor : PA-044/KPN.0101/2025 Satker Dengan Penyerapan Anggaran – Pagu Kecil TERBAIK II.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANWIL DJKN BANDA ACEH

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	506050 KANWIL DJKN BANDA ACEH	PAGU	0	2,211,123,000	16,008,257,000	0	0	0	0	0	0	18,219,380,000
		REALISASI	0.00%	1,780,646,835 (80.53%)	176,223,192 (1.10%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,956,870,027 (10.74%)
		SISA	0	430,476,165	15,832,033,808	0	0	0	0	0	0	16,262,509,973
GRAND TOTAL		PAGU	0	2,211,123,000	16,008,257,000	0	0	0	0	0	0	18,219,380,000
		REALISASI	(0.00%)	1,780,646,835 (80.53%)	176,223,192 (1.10%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	1,956,870,027 (10.74%)
		SISA	0	430,476,165	15,832,033,808	0	0	0	0	0	0	16,262,509,973

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan capaian kinerja atas 8 (delapan) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 18 IKU sesuai dengan Kemenkeu *Two* Kanwil DJKN Tahun 2025 dapat tercapai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,60%.

Dalam pencapaian target kinerja pada tahun 2025, Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Aceh mengalami perbedaan dibandingkan dengan tahun 2024, dimana untuk Tahun 2025 ini pada dasarnya memiliki karakter dan jumlah IKU yang berbeda dengan tahun 2024. Optimisme dan pengalaman dari tahun 2024 menjadikan Kanwil DJKN Aceh dapat menangani penyelesaian target kinerja yang sudah ditetapkan dari Kantor Pusat DJKN dengan sangat signifikan dengan predikat capaian Sangat Baik.

Sebagai unit vertikal yang berada di ujung barat Pulau Sumatera, Kanwil DJKN Aceh telah bekerja secara optimal, sehingga guna menghadapi tantangan pada tahun 2025, telah dibuat Rencana Aksi atau *action plan* dari masing-masing bidang/bagian umum, yaitu :

A. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

1. Sosialisasi kepada satuan kerja terkait peraturan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian, pengamanan, penatausahaan, dan rekonsiliasi BMN;
2. Mengadakan *knowledge sharing* dan FGD terkait pengelolaan kekayaan negara;
3. Melaksanakan layanan konsultasi pengelolaan barang milik negara, dan bimbingan teknis aplikasi SIMAN, SIMANTAP dan SIMAK BMN;
4. Penggalan potensi nilai kekayaan negara yang diutilisasi dan potensi manfaat ekonomi melalui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan

Penghargaan yang diterima Kanwil DJKN Aceh di tahun 2025



PPID Tingkat II Kategori Informatif



Satker TA 2024 - Terbaik I



Satker Dengan Penggunaan CMS - Pagu Kecil - Terbaik I



Satker Dengan IKPA Nilai Sempurna (100) - Bobot 100% - Terbaik III



Penyusunan Laporan Keuangan Tk. UAPPA - Wilayah Kategori Satker Kecil - Lingkup Kanwil DJPb Prov. Aceh Tahun 2024



Satker Dengan IKPA - Pagu Kecil - Terbaik II



Satker Dengan Penggunaan Digipay - Pagu Kecil - Terbaik III



Satker Dengan Implementasi KKP - Pagu Kecil - Terbaik I



Satker Dengan Kecepatan Pengiriman dan Kualitas LK - Terbaik I



Satker Dengan Penyerapan Anggaran - Pagu Kecil - Terbaik II

pemindahtanganan BMN;

B. Bidang Penilaian

1. Ekstensifikasi potensi SDM di bidang penilaian;
2. Peningkatan kapasitas Penilai dilakukan secara berkala;
3. Koordinasi bersama *stakeholders* potensial;
4. Pembebanan hasil *quality assurance* ke dalam IKU individu Penilai;
5. Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dengan verifikasi dan menyusun DKPB.

C. Bidang Piutang Negara

1. Pembinaan kualitas SDM terkait administrasi pengurusan piutang negara;
2. Penyamaan persepsi mengenai kelengkapan dokumen penyerahan dan tata cara penyerahan;
3. Penggalan Potensi Piutang Negara dengan prioritas piutang BPJS ketenagakerjaan, dan Piutang pemerintah daerah secara lebih intensif;
4. Perbantuan SDM secara langsung berupa Penatausahaan BKPN serta Perbantuan/pendampingan dalam upaya penagihan langsung dan asistensi pengurusan piutang negara.

D. Bidang Lelang

1. Melaksanakan penggalan potensi lelang dan sosialisasi lelang;
2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang kelas I dan pejabat lelang kelas II dilingkup Kanwil DJKN Aceh;
3. Pengangkatan/pelantikan Pejabat Lelang Kelas II dan pemberian *reward* kepada Pejabat Lelang Kelas I atas kinerja;
4. Membangun *database* bidang lelang;
5. Pelaksanaan *in-house training* penyusunan laporan di bidang lelang;
6. Melaksanakan pemeriksaan risalah lelang, pemusnahan kertas sekuriti di KPKNL;
7. Pelaksanaan rapat kinerja setiap semester di bidang lelang;

8. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan lelang via *e-auction*.

E. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

1. Mengadakan forum kinerja di lingkup Kanwil maupun KPKNL;
2. Mengembangkan kegiatan sinergi antar bidang menjadi kegiatan Kemenkeu Satu dengan menghadirkan pemateri dari seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Mengadakan *Forum Group Discussion* terkait manajemen risiko di lingkungan Kanwil DJKN Aceh;
4. Peningkatan kualitas penanganan perkara melalui kegiatan Duek Pakat Lelang dan Penanganan Perkara.

F. Bagian Umum

1. Menugaskan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi serta memperhatikan pemenuhan kompetensi pegawai;
2. Percepatan pelaksanaan program kegiatan segera setelah revisi anggaran disahkan;
3. Penajaman program dan kegiatan kerja;
4. Pemantauan secara berkala atas pelaksanaan paket pengadaan agar selesai tepat pada waktunya dan sesuai dengan kontrak.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Aceh, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meingkatkan kinerja organisasi, sekaligus secara eksternal dapat menjadi indikator dalam dalam menyesuaikan tuntutan stakeholder. Akhirnya, kita semua berharap Kanwil DJKN Aceh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Kanwil DJKN Aceh Tahun 2025
2. Adendum Perjanjian Kinerja Kanwil DJKN Aceh 2025

**PERJANJIAN KINERJA
KANWIL DJKN ACEH TAHUN 2025**



PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-10/KN/2025

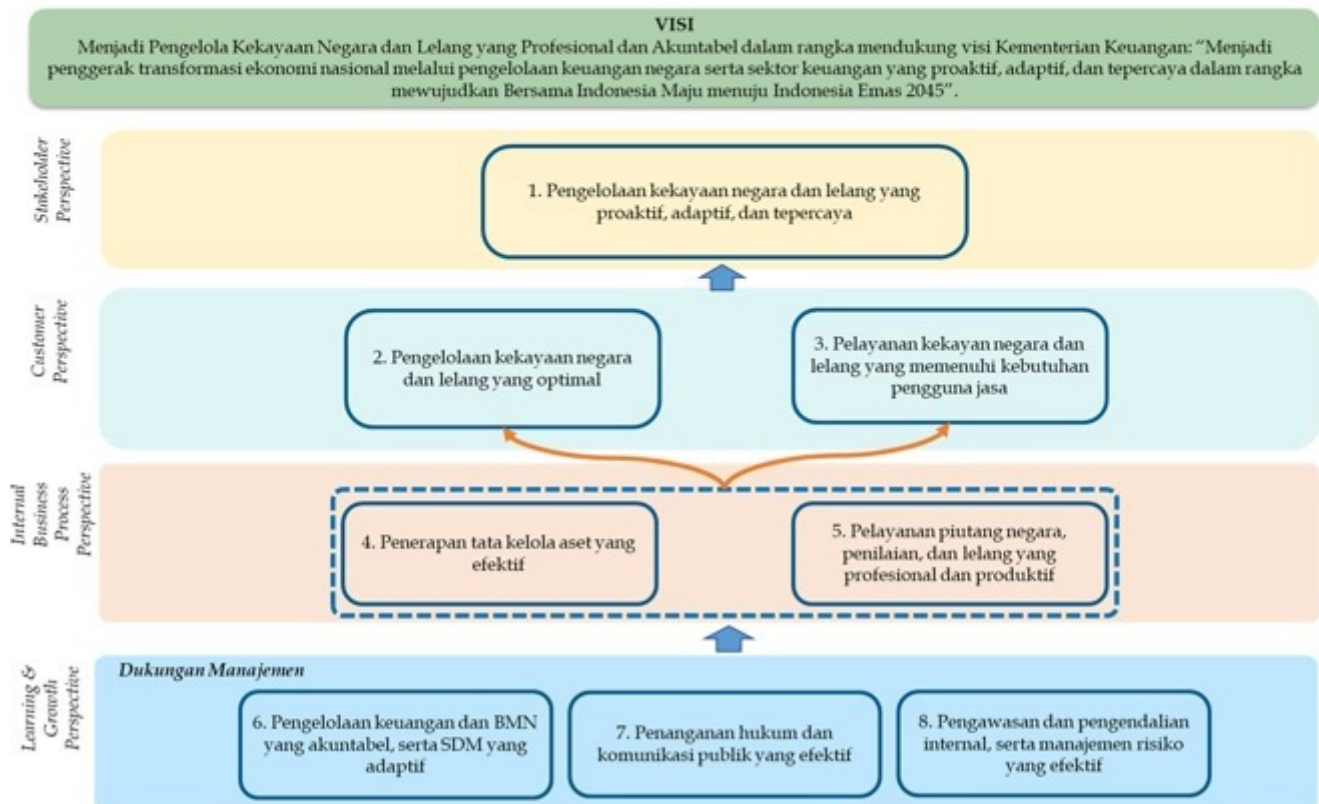
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp31,9 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Persentase realisasi Pokok lelang	100% (Rp128,0 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp820 Jt)
		2c-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3c-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.55
		7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Program:

Anggaran



Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Kegiatan	Rp776,309,000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp54,024,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp275,601,000
3. Pengelolaan Aset	Rp446,684,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp17,231,222,000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp8,752,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp17,163,704,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp42,087,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp15,679,000

Kota Banda Aceh, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Nofiansyah



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp31,9 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi Pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp128,0 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp820 Jt)
2c-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

Kota Banda Aceh, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Nofiansyah



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Banda Aceh, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Nofiansyah



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Nofiansyah		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19741111 199403 1 001		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp31,9 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Persentase realisasi Pokok lelang	100% (Rp128,0 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp820 Jt)	Penerima Layanan
		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.55	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p>



PERILAKU KERJA		
	<p>Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	<p>Adaptif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	<p>Kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Banda Aceh, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Nofiansyah

19741111 199403 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	90 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp31,9 M)
2a-CP	Persentase realisasi Pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp128,0 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp820 Jt)
2c-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77



3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



Kota Banda Aceh, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Nofiansyah

19741111 199403 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025





**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-10a/KN/2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

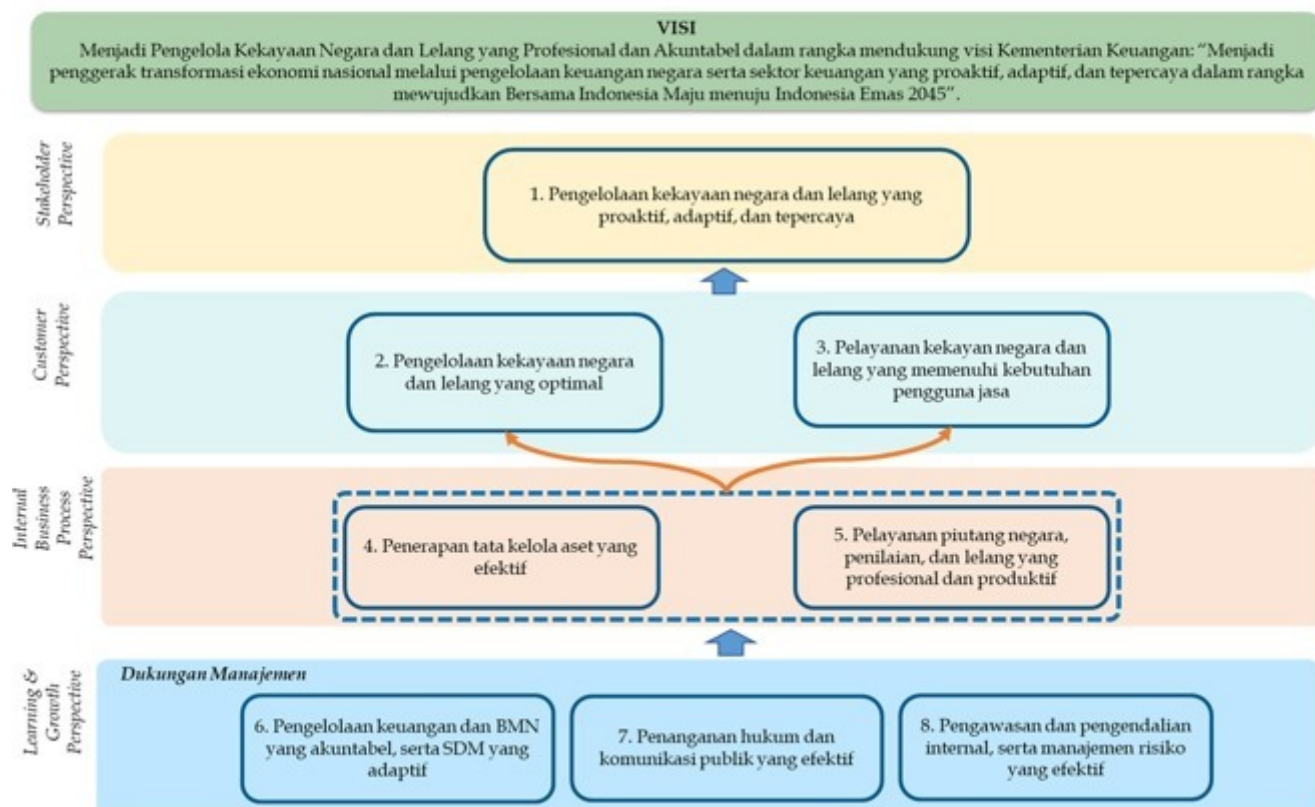


Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp31,9 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Persentase realisasi Pokok lelang	100 (Rp135,4 M)
		2b-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2.495 Jt)
		2c-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70
		3c-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100
		5b-CP Persentase produktivitas lelang	80
		5c-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80
		6c-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-CP Indeks efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.55
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Anggaran

Rp776,309,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalND]



Kegiatan

- | | |
|--|---------------|
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp54,024,000 |
| 2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | Rp275,601,000 |
| 3. Pengelolaan Aset | Rp446,684,000 |

Program:

Program Dukungan Manajemen	Rp17,231,222,000
----------------------------	------------------

Kegiatan

- | | |
|--|------------------|
| 1. Legislasi dan Litigasi | Rp8,752,000 |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp17,163,704,000 |
| 3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp42,087,000 |
| 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp15,679,000 |

Banda Aceh, Januari 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Nofiansyah



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100 (Rp31,9 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi Pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100 (Rp135,4 M)
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2.495 Jt)
2c-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70	70	70	70	70	70	70
3c-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	100	100	100	100	100	100
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	40	40	70	70	80	80
5c-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	70	70	70	70	70	70
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20	40	40	60	60	80	80
6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Indeks efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

Banda Aceh, Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Nofiansyah



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Banda Aceh, Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Nofiansyah



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Nofiansyah		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19741111 199403 1 001		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp31,9 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Persentase realisasi Pokok lelang	100 (Rp135,4 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2.495 Jt)	Penerima Layanan
		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.55	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA	
1	Berorientasi pelayanan



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Banda Aceh, Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Nofiansyah
19741111 199403 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban
19660423 199010 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [TanggalIND]



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Oktober s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	92 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100 (Rp31,9 M)
2a-CP	Persentase realisasi Pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100 (Rp135,4 M)
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2.495 Jt)
2c-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalIND]



3b-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70	70	70	70	70	70	70
3c-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	100	100	100	100	100	100
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	40	40	70	70	80	80
5c-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	70	70	70	70	70	70
6a-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20	40	40	60	60	80	80
6c-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
7a-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Indeks efektivitas Ekosistem Kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



Banda Aceh, Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Nofiansyah

19741111 199403 1 001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [TanggalIND]

